

The background image shows a large, two-story government building with a prominent red-tiled roof and a central entrance. In front of the building is a stone monument with a white horse sculpture. The monument has text on it, including 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH' and 'KABUPATEN SUMENEP'. The building is surrounded by greenery, including palm trees and manicured bushes. The sky is clear and blue.

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah

Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP



Drs. FAJAR RAHMAN, M.Si
NIP. 19640521 199203 1 004
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	51
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : yang disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang terdiri dari 4 bagian yaitu Bagian Umum, bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

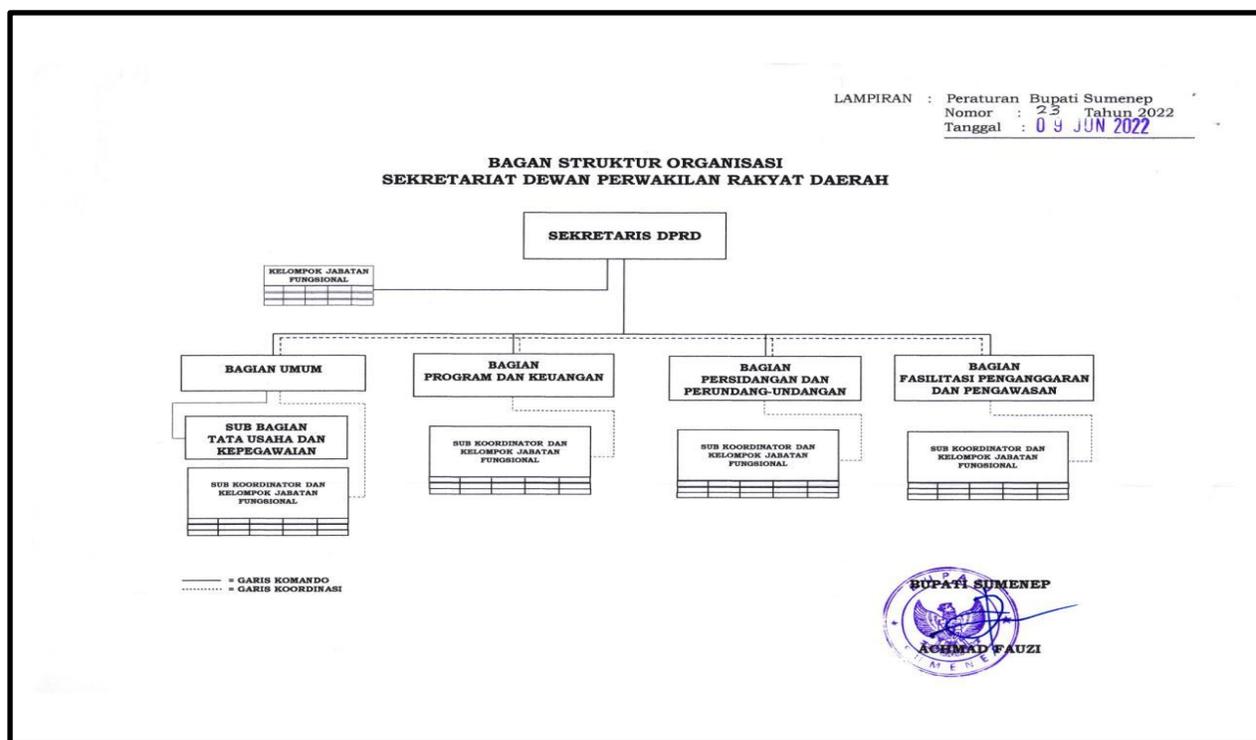
1. Pemberian dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pemberian dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
3. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
4. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang administrasi, hukum, perencanaan dan keuangan belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yaitu tenaga notulensi dan tenaga akuntansi yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.

2. Masih terbatasnya sarana/prasarana perkantoran termasuk konstruksi bangunan Gedung DPRD saat ini yang mengalami kegagalan struktur bangunan sangat tidak layak ditempati untuk kegiatan rapat-rapat DPRD.
3. Belum terselenggaranya fasilitasi dukungan keahlian bagi DPRD berupa penyediaan tenaga ahli/kelompok pakar maupun staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pendampingan dalam kegiatan pembahasan guna memenuhi kebutuhan substansif DPRD.
4. Masih terbatasnya penyediaan kebutuhan literatur peraturan perundangan yang sesuai dengan perkembangan.
5. Masih terbatasnya pendukung IT untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang sedang dilakukan DPRD serta memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara *online*.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep baru merupakan kebutuhan strategis yang harus di prioritaskan dalam progam dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep. Pada tahun 2023 sudah dilakukan peletakan batu pertama (Ground Breaking) Kantor DPRD Kab. Sumenep di daerah Desa Gedungan Sumenep
2. Sehubungan telah ditetapkannya Jabatan Fungsional (Jabfung) Sekretariat DPRD Kab. Sumenep maka perlu dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis (Bintek) yang lebih berorientasi pada Kompetensi Spesifik sesuai Jabatan Fungsional yang di ampu pada masing-masing personil Sekreatriat DPRD Kab. Sumenep.
3. Perubahan Regulasi pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah khususnya penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda menimbulkan persoalan pada penempatan keahlian personal di Sekretariat DPRD Kab. Sumenep terdapat beberapa Jabatan Fungsional ditempatkan pada Bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keahlian dan Kompetensi yang melekat pada Jabatan Fungsional tersebut.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yg akuntabel, tanggap dan inovatif.	1. Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government 2. Pengembangan kapasitas aparatus sipil negara (ASN) pemerintah daerah. 3. Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan.	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks profesionalisme aparatur 4. Nilai SAKIP 5. Opini atas audit BPK 6. Tingkat maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	80,65	81,15	81,65	82,15	82,65

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	1.1 Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	<p>Nilai (hasil Survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.</p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diformulasikan dengan satuan nilai yang diperoleh dari Hasil Survey terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Sekretariat DPRD . Dalam Penyusunan Survey ini dilakukan terhadap 3 Responden yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD, Elemen Masyarakat dan Aparatur Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD</p>	<p>1. Bobot Nilai Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$</p> <p>2. SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p> <p>3. SKM Unit Pelayanan x 25</p>	Laporan Akhir SKM Sekretariat DPRD Kab. Sumenep

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik			Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik		
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	81,15
		1.2	Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase %	90

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Sub Kegiatan. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	81,15	81,15

2	Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	%	90%	90%
---	---	---	---	-----	-----

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	Sekretariat DPRD				63.403.123.947	69.707.022.658
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100	100	42.148.533.072	45.427.454.731
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	18	18	60.754.150	110.754.150
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4	4	9.283.099	9.283.099
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	4.861.550	4.861.550

1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.437.410	4.437.410
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	4.456.050	4.456.050
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.439.574	4.439.574
1.6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	29.890.412	79.890.412
1.7	Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	3.386.055	3.386.055
2	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	109	109	6.385.997.735	6.655.997.735
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	65	6.375.058.907	6.645.058.907

2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44	44	10.938.828	10.938.828
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	18	18	193.104.240	283.509.440
3.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	103.528.240	128.596.240
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	16	89.576.000	154.913.200
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	47	47	530.591.605	839.815.344
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	24.449.900	30.396.500
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	149.273.355	427.575.494
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	74.216.350	99.191.350

4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	181.072.000	181.072.000
4.5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	101.580.000	101.580.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	16	28	215.860.932	791.916.433
6.1	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	0	1	-	532.099.701
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	16	28	215.860.932	259.816.732
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	28	28	1.314.963.529	1.302.463.529
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.690.417	3.690.417
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	470.722.800	458.222.800
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	840.550.312	840.550.312

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	113	113	851.528.490	929.507.277
8.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	41	618.736.000	642.350.840
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	16.869.200	16.869.200
8.3	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	5	165.829.290	211.173.237
8.4	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	62	62	50.094.000	59.114.000
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	102	106	28.361.980.725	29.542.019.817
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	27.964.128.105	28.411.460.697
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	6	242.924.000	951.255.500

9.3	Pelaksanaan Medical Check up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	50	154.928.620	179.303.620
10	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	21	21	4.233.751.666	4.971.471.006
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	20	4.033.884.400	4.771.603.740
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1	1	199.867.266	199.867.266
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100	100	21.254.590.875	24.279.567.927
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	15	15	5.958.345.880	6.574.287.880
1.1	Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	1	1	3.631.981.100	3.373.596.300
1.2	Pembahasan Rancangan perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	8	1.338.890.000	2.228.421.200
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	1	364.839.380	349.634.980
1.4	Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	4	4	605.687.800	605.687.800

1.5	Penyusunan Tata tertib	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	1	16.947.600	16.947.600
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	5	5	3.356.759.050	4.226.193.250
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	785.901.400	785.901.400
2.2	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	1	708.783.950	1.021.289.350
2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	144.604.400	757.607.800
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	724.919.300	724.919.300
2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	992.550.000	936.475.400
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	64	64	1.593.813.000	1.243.698.000
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16	16	299.300.400	270.645.400
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	16	16	450.794.700	330.979.700

3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16	16	432.569.900	352.049.900
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	16	16	411.148.000	290.023.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	86	86	2.787.485.180	3.549.479.380
4.1	Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	3	1.362.265.600	1.843.614.400
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	69	69	1.048.491.200	1.329.136.600
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4	4	102.080.436	102.080.436
4.4	Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10	10	179.126.224	179.126.224
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	95.521.720	95.521.720
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	53	53	3.043.283.333	3.929.420.905
5.1	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	50	50	434.862.618	101.275.418

5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	2.608.420.715	3.828.145.487
6	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi	1	1	847.086.700	716.388.980
6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	847.086.700	716.388.980
7	Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi	36	48	435.919.600	572.341.600
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komuniikasi dan Publikasi yang disusun	36	48	435.919.600	572.341.600
8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	17	17	3.231.898.132	3.467.757.932
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5	5	1.685.027.493	1.577.067.093
8.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	1.546.870.639	1.890.690.839

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
...
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	81,15	81,27	100,14%	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD

Uraian penjelasan tabel :

Adanya realisasi kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 100,14% disebabkan beberapa kenaikan nilai kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya Kenaikan Nilai Pelayanan Rapat DPRD yang memiliki persentase nilai sebesar 80,49% kemudian kenaikan pada nilai pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki persentase sebesar 86,54%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	80,65	80,71	100,07 %	81,15	81,27	100,14%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil perbandingan terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 80,71 dan Hasil Analisis terhadap Survey Hasil Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 81,27 maka terdapat kenaikan sebesar 0,07 % . Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya nilai Kepuasan Masyarakat yang meningkat khususnya pada Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yakni sebesar 81,43. Disamping itu terdapat kenaikan pada nilai Indeks

Kepuasan Internal Sekretariat DPRD terhadap Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD yakni sebesar 81,51.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	81,27	82,65	98,33

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan analisa terhadap hasil nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep Tahun 2023 yang merupakan tahun ke-2 pada pelaksanaan Renstra, maka dapat diperoleh nilai Perbandingan antara realisasi nilai IKM Sekretariat DPRD Tahun 2023 dibandingkan dengan nilai Target IKM Sekretariat DPRD Tahun 2026 yakni sebesar 98,33. Untuk mencapai target 100% di Tahun Akhir Renstra maka diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD khususnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Disamping itu perlu juga dilakukan usaha peningkatan pelayanan terhadap layanan Penyediaan Kebutuhan Internal Sekretariat DPRD serta Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat upaya peningkatan Pelayanan terhadap tiga komponen tersebut pada akhirnya akan

memberikan kontribusi terhadap kenaikan nilai IKM Sekretariat DPRD secara signifikan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	81,27	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik	86	81,27	94.5%		
II	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	81,15	81,27	100,14%		

III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100	99,38	99,38	Secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga terpenuhi
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	18	18	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	4	100,00	

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100,00	
Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	109	109	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	65	100,00	
Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44	44	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	Jumlah Pemenuhan asministrasi kepegawaian daerah	19	19	100,00	
Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	16	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	47	47	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10	10	100,00	

	Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100,00	
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	28	28	100,00	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1	1	100,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	28	28	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	28	28	100,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	113	112	99,12
Penyediaan pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Jabatan	Jasa biaya Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	40	97,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100,00
Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	5	100,00
Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	62	62	100,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	106	101	95,28
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	100,00
Penyediaan Dinas dan DPRD	Pakaian dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	6	100,00
Pelaksanaan Check up	Medical	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	45	90,00
Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi	Jumlah Layanan Administrasi	21	21	100,00

		DPRD yang disediakan				
Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	20	100,00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1	1	100,00	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100	96,16	96,16	Secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun ada sub kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	15	15	100,00	
Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	1	1	100,00	
Pembahasan Rancangan perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	8	100,00	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	1	100,00	
Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	4	4	100,00	
Penyusunan Tata tertib		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	1	100,00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	5	5	100,00	
Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil	1	1	100,00	

		Pembahasan KUA dan PPAS				
	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	1	100,00	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	100,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	100,00	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	64	29	45,31	
	Pengawasan Pemerintahan dan Hukum	Urusan bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16	6	37,50	
	Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur	Urusan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	16	7	43,75	
	Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat	Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16	7	43,75	
	Pengawasan Pemerintahan Perekonomian	Urusan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	16	9	56,25	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	96	119	96,55	
	Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4	100,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah,	69	69	100,00	

		Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4	4	100,00
Penyediaan tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	100,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	35	291,67
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	53	53	100,00
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	50	50	100,00
Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	100,00
Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi	1	1	100,00
Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	100,00
Pembahasan Kerja sama Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi	48	48	100,00
Penyusunan Komunikasi dan Publikasi	Bahan dan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	48	48	100,00
Fasilitasi DPRD	Tugas	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	17	17	100,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan DPRD	dan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	5	5	100,00

		Pelaksanaan Tugas DPRD				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	100,00	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 maka dapat diketahui capaian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatandan sub kegiatan pada Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yakni sebesar 97,77%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang sebesar 95,04% maka terdapat kenaikan Indikator Kinerja sebesar 2,73%. Hal Ini menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Sumenep.

Meski demikian terdapat beberapa Indikator penurunan relalisasi kinerja yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD khususnya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada 4 sub kegiatan yakni :

1. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 6 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 37,50%
2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 43,75%
3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 43,75%
4. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 9 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 56,25%

Indikasi penurunan Indikator realisasi kinerja pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum dikarenakan adanya Intensitas dan frekuensi kegiatan konsultasi dan koordinasi DPRD Kabupaten Suemnep yang lebih sering dilaksanakan daripada frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami penurunan ini khususnya pada kegiatan pengawasan dalam daerah DPRD. Kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih memilih kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah menyebabkan penurunan pada kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah termasuk didalamnya kegiatan pengawasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik					
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	81,27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	97,85	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	86,24	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76,92	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	99,12	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

					Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97,56	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	95,28	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pelaksanaan Medical Check up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	90,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan

					Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Program dan Kegiatan
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	92,27	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan Rancangan perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Penyusunan Tata tertib	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

				Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	45,31	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	37,50	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	43,75	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43,75	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	56,25	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	96,55	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

			Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	291,67	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
			Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Daerah yang terfasilitasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100,00	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan dari hasil uraian tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja yaitu didukung oleh keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Sekretariat DPRD. Pada Program Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD khususnya pada sub kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Reses berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tercapainya indikator Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD didukung oleh optimalnya capaian program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan indikator Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi yang ditargetkan 100% terealisasi 97,85% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan 100% terealisasi 93,16%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja sub kegiatan dari Sub Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD yaitu :

1. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Program dan Pembahasan Perda yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen. Keberhasilan tercapainya kinerja sub kegiatan ini yaitu Dokumen Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188/152/435.050/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Suemnep Tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen.

Diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebanyak 19 usulan yaitu :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan masyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Garis Sempadan pantai;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Parkir;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusatamaan Gender;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Reforma Agraria;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Wawasan Kebangsaan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan Bagi Usaha Tambak Udang;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah diantaranya :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sumekar;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertembakauan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan keris;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda ditargetkan sebanyak 8 Dokumen dan terealisasi sebanyak 8 Dokumen yaitu

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses yang ditargetkan sebanyak 3 Dokumen dan Terealisasi sebanyak 3 Dokumen. Dimana pada Tahun 2023 DPRD Kab. Sumenep telah melaksanakan Kegiatan Reses sebanyak 3 kali di daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	45.427.454.731	43.513.969.234	95,44
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.754.150	104.938.400	94,75
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.283.099	8.355.000	90,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.861.550	4.523.700	93,05
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.437.410	3.961.000	89,26
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.456.050	2.187.200	49,08
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.439.574	4.234.000	95,37
1.6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.890.412	79.247.500	99,20
1.7	Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	3.386.055	2.430.000	71,76

2	Administrasi Keuangan Daerah	6.655.997.735	6.453.984.141	96,96
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.645.058.907	6.443.064.141	96,96
2.2	Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.938.828	10.920.000	99,83
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.509.440	276.114.600	97,39
3.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	128.596.240	122.794.400	95,49
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.913.200	153.320.200	98,97
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	839.815.344	768.385.693	91,49
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.396.500	30.120.600	99,09
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.575.494	409.090.500	95,68
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.191.350	95.448.000	96,23
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	181.072.000	133.686.093	73,83
4.5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.580.000	100.040.500	98,48
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	791.916.433	784.200.400	99,03
6.1	Pengadaan Mebel	532.099.701	527.464.400	99,13
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	259.816.732	256.736.000	98,81
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.302.463.529	1.143.470.894	87,79
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.417	1.618.500	43,86
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	458.222.800	355.708.130	77,63
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840.550.312	786.144.264	93,53
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	929.507.277	896.762.133	96,48
8.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	642.350.840	615.575.324	95,83
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.869.200	14.979.500	88,80
8.3	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.173.237	207.258.259	98,15
8.4	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.114.000	58.949.050	99,72
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29.542.019.817	28.121.930.679	95,19
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.411.460.697	27.066.650.435	95,27
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	951.255.500	897.741.000	94,37
9.3	Pelaksanaan Medical Check up	179.303.620	157.539.244	87,86
10	Layanan Administrasi DPRD	4.971.471.006	4.964.182.294	99,85
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.771.603.740	4.764.415.540	99,85
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	199.867.266	199.766.754	99,95
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.279.567.927	22.969.956.634	91,23
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	6.574.287.880	6.485.421.518	98,65
1.1	Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	3.373.596.300	3.343.403.600	99,11
1.2	Pembahasan Rancangan perda	2.228.421.200	2.209.878.534	99,17

1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	349.634.980	321.927.284	92,08
1.4	Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik	605.687.800	596.478.600	98,48
1.5	Penyusunan Tata tertib	16.947.600	13.733.500	81,04
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.226.193.250	4.053.081.062	95,90
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	785.901.400	780.058.600	99,26
2.2	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1.021.289.350	1.004.329.800	98,34
2.3	Pembahasan APBD	757.607.800	752.510.700	99,33
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	724.919.300	687.189.100	94,80
2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	936.475.400	828.992.862	88,52
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.243.698.000	744.936.680	59,90
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	270.645.400	152.637.600	56,40
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	330.979.700	193.427.100	58,44
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	352.049.900	221.076.480	62,80
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	290.023.000	177.795.500	61,30
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.549.479.380	3.378.373.069	95,18
4.1	Bimtek DPRD	1.843.614.400	1.780.979.700	96,60
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.329.136.600	1.268.066.369	95,41
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	102.080.436	96.584.000	94,62
4.4	Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	179.126.224	169.525.000	94,64
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.521.720	63.218.000	66,18
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.929.420.905	3.643.171.400	92,72
5.1	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	101.275.418	94.584.500	93,39
5.2	Pelaksanaan Reses	3.828.145.487	3.548.586.900	92,70
6	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	716.388.980	670.604.331	93,61
6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	716.388.980	670.604.331	93,61
7	Pembahasan Kerja sama Daerah	572.341.600	539.447.000	94,25
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	572.341.600	539.447.000	94,25
8	Fasilitasi Tugas DPRD	3.467.757.932	3.454.921.574	99,63
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.577.067.093	1.568.943.231	99,48
8.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.890.690.839	1.885.978.343	99,75

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
I	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	81,15	81,27	100,14 %	69.707.022.658	66.483.925.868	95,38%	4,76

Uraian penjelasan tabel :

Dengan mengacu pada data realisasi Anggaran dan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 maka dapat diperbandingkan bahwa realisasi Anggaran yang persentasenya sebesar 95,38% dengan realisasi Indikator Kinerja yang persentasenya sebesar 100,14% maka diperoleh selisih sebesar 4,76. Berdasarkan perhitungan selisih tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep memiliki Tingkat Efisiensi melebihi nilai 1.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	52	97,85	45.427.454.731	43.513.969.234	95,44	2,41
1	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	18	100,00	110.754.150	104.938.400	94,75	5,25
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100,00	9.283.099	8.355.000	90,00	10,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	100,00	4.861.550	4.523.700	93,05	6,95
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	100,00	4.437.410	3.961.000	89,26	10,74
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1	1	100,00	4.456.050	2.187.200	49,08	50,92
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	1	100,00	4.439.574	4.234.000	95,37	4,63
1.6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00	79.890.412	79.247.500	99,20	0,8
1.7	Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	6	6	100,00	3.386.055	2.430.000	71,76	28,24
2	Administrasi Keuangan Daerah	109	86,24	86,24	6.655.997.735	6.453.984.141	96,96	-10,72
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65	65	76,92	6.645.058.907	6.443.064.141	96,96	-20,04
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	44	44	100,00	10.938.828	10.920.000	99,83	0,17

	Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD								
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18	100,00	100,00	283.509.440	276.114.600	97,39		2,61
3.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	3	3	100,00	128.596.240	122.794.400	95,49		4,51
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	16	100,00	154.913.200	153.320.200	98,97		1,03
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47	100,00	100,00	839.815.344	768.385.693	91,49		8,51
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	100,00	30.396.500	30.120.600	99,09		0,91
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	100,00	427.575.494	409.090.500	95,68		4,32
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	6	100,00	99.191.350	95.448.000	96,23		3,77
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	12	12	100,00	181.072.000	133.686.093	73,83		26,17
4.5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	100,00	101.580.000	100.040.500	98,48		1,52
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28	100,00	100,00	791.916.433	784.200.400	99,03		0,97
6.1	Pengadaan Mebel	1	1	100,00	532.099.701	527.464.400	99,13		0,87
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	28	28	100,00	259.816.732	256.736.000	98,81		1,19
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28	100,00	100,00	1.302.463.529	1.143.470.894	87,79		12,21
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	3.690.417	1.618.500	43,86		56,14
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100,00	458.222.800	355.708.130	77,63		22,37
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	100,00	840.550.312	786.144.264	93,53		6,47
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	113	99,12	99,12	929.507.277	896.762.133	96,48		2,64

	Urusan Pemerintah Daerah								
8.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	41	40	97,56	642.350.840	615.575.324	95,83	1,73	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	100,00	16.869.200	14.979.500	88,80	11,2	
8.3	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5	100,00	211.173.237	207.258.259	98,15	1,85	
8.4	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62	62	100,00	59.114.000	58.949.050	99,72	0,28	
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	106	95,28	95,28	29.542.019.817	28.121.930.679	95,19	0,09	
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50	50	100,00	28.411.460.697	27.066.650.435	95,27	4,73	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6	6	100,00	951.255.500	897.741.000	94,37	5,63	
9.3	Pelaksanaan Medical Check up	50	45	90,00	179.303.620	157.539.244	87,86	2,14	
10	Layanan Administrasi DPRD	21	100,00	100,00	4.971.471.006	4.964.182.294	99,85	0,18	
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	20	100,00	4.771.603.740	4.764.415.540	99,85	0,15	
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1	1	100,00	199.867.266	199.766.754	99,95	0,05	
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	92,27	24.279.567.927	22.969.956.634	91,23	1,04	
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15	15	100,00	6.574.287.880	6.485.421.518	98,65	1,35	
1.1	Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	1	1	100,00	3.373.596.300	3.343.403.600	99,11	0,89	
1.2	Pembahasan Rancangan perda	8	8	100,00	2.228.421.200	2.209.878.534	99,17	0,83	
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	1	1	100,00	349.634.980	321.927.284	92,08	7,92	
1.4	Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik	4	4	100,00	605.687.800	596.478.600	98,48	1,52	
1.5	Penyusunan Tata tertib	1	1	100,00	16.947.600	13.733.500	81,04	18,96	

2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	5	100,00	4.226.193.250	4.053.081.062	95,90	4,1
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00	785.901.400	780.058.600	99,26	0,74
2.2	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	1	100,00	1.021.289.350	1.004.329.800	98,34	1,66
2.3	Pembahasan APBD	1	1	100,00	757.607.800	752.510.700	99,33	0,67
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	1	1	100,00	724.919.300	687.189.100	94,80	5,2
2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00	936.475.400	828.992.862	88,52	11,48
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	64	29	45,31	1.243.698.000	744.936.680	59,90	-14,59
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	16	6	37,50	270.645.400	152.637.600	56,40	-18,9
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16	7	43,75	330.979.700	193.427.100	58,44	-11,69
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	16	7	43,75	352.049.900	221.076.480	62,80	-19,05
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16	9	56,25	290.023.000	177.795.500	61,30	-5,05
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	86	84	96,55	3.549.479.380	3.378.373.069	95,18	1,37
4.1	Bimtek DPRD	4	4	100,00	1.843.614.400	1.780.979.700	96,60	3,4
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	69	69	100,00	1.329.136.600	1.268.066.369	95,41	4,59
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4	4	100,00	102.080.436	96.584.000	94,62	5,38
4.4	Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	7	7	100,00	179.126.224	169.525.000	94,64	5,36
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	35	291,67	95.521.720	63.218.000	66,18	225,49
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	53	100,00	100,00	3.929.420.905	3.643.171.400	92,72	7,28
5.1	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	50	50	100,00	101.275.418	94.584.500	93,39	6,61
5.2	Pelaksanaan Reses	3	3	100,00	3.828.145.487	3.548.586.900	92,70	7,3
6	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1	100,00	100,00	716.388.980	670.604.331	93,61	6,39

6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	100,00	716.388.980	670.604.331	93,61	6,39
7	Pembahasan Kerja sama Daerah	48	48	100,00	572.341.600	539.447.000	94,25	5,75
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	48	48	100,00	572.341.600	539.447.000	94,25	5,75
8	Fasilitasi Tugas DPRD	17	17	100,00	3.467.757.932	3.454.921.574	99,63	0,37
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5	5	100,00	1.577.067.093	1.568.943.231	99,48	0,52
8.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	100,00	1.890.690.839	1.885.978.343	99,75	0,25

Uraian penjelasan tabel :

Dengan mengacu pada program dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 maka dengan spesifik dapat diketahui terdapat efisiensi realisasi kinerja dengan membandingkan realisasi anggaran Sekretariat DPRD pada program utama dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya pada sub kegiatan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan Tata tertib DPRD, pembahasan pertanggungjawaban APBD, Pelaksanaan Reses dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat memiliki tingkat Efisiensi diatas nilai 5 hal ini membuktikan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat DPRD berjalan Optimal dengan Anggaran kegiatan dibawah 100%.

Kinerja Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD” Dengan indikator “Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD” tercapai 81,27% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,38% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 4,76 %,-

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Sumenep Sebesar 100,14%, dengan capaian penggunaan anggaran 95,38% dari total pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran maka Sekretariat DPRD Kab. Sumenep dalam mewujudkan kinerja tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sebesar 2,39 % senilai Rp. 3.223.096.790,-

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,5% (Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,14% (Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,77% (Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.707.022.658,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 66.483.925.868,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,62%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. FAJAR RAHMAN, M.Si
NIP. 19640521 199203 1 004
Pembina Utama Muda





DAERAH KAL. XI MADURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

JL. TRUNOJOYO NO.124 TELP./0328/644344
SUMENEP